

Kementan Siapkan Lahan 2 Juta Hektare untuk Proyek Bioetanol



Sumber : Kementerian Pertanian RI |

Kementerian Pertanian menginisiasi langkah untuk mengakselerasi kemandirian energi nasional melalui penyiapan kawasan pertanian seluas 2 juta hektare.



**Reformasi Tata Kelola Minerba
Dongkrak PNBP dan Stabilitas
Harga Komoditas Indonesia**



**Atasi Krisis Demografi Jepang,
Pemprov Jateng Siap Pasok
Tenaga Pengemudi Terampil**



**Ekspansi Energi Terbarukan
Turki Pangkas Drastis Impor
BBM**



**Rekor Impor Beras Filipina
Buka Peluang Bagi Eksportir
Vietnam dan Indonesia**

Kementan Siapkan Lahan 2 Juta Hektare untuk Proyek Bioetanol



Sumber : Kementerian Pertanian RI |

Kementerian Pertanian gandeng sektor swasta dan BUMN kembangkan industri bahan bakar hayati.

Kementerian Pertanian menginisiasi langkah untuk mengakselerasi kemandirian energi nasional melalui penyiapan kawasan pertanian seluas 2 juta hektare. Lahan terintegrasi ini diproyeksikan untuk mengamankan pasokan komoditas tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku utama industri bioetanol domestik.

Ketiga komoditas akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol, sementara singkong dan jagung dikembangkan di wilayah dengan kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi konsolidasi lahan bersama 44 pemerintah daerah guna menarik modal investasi pengolahan. Skema pembiayaan industri dirancang berbasis kemitraan strategis, nantinya sektor swasta menguasai 70% porsi investasi dan BUMN menyumbang 30%, didukung jaminan penyediaan tanah oleh negara.

Inisiatif ini mewajibkan keterlibatan masyarakat daerah dengan porsi kepemilikan minimal 30% untuk menghindari monopoli. Program ini ditargetkan menyerap hingga 8 juta tenaga kerja

permanen serta memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional baru.

“Kepastian lahan oleh negara adalah fondasi utama investasi bioetanol. Kita mendorong pertumbuhan inklusif agar masyarakat daerah ikut menikmati rantai nilai energi,” ujar Amran di Jakarta Senin (21/09).

Untuk tahap awal, Kementan akan fokus pada pengembangan produk jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan, dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten. Sementara untuk produk tebu, rencana pengembangannya dalam skala yang lebih besar. Selain itu, dukungan berupa alat dan mesin pertanian juga akan disiapkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.

Peta jalan pengembangan energi bersih ini dirancang untuk meningkatkan bauran bahan bakar secara terukur, mulai dari E5, E10, E20 pada 2029, hingga mencapai E40 pada 2030. Kementan memastikan ekspansi kawasan tetap mematuhi prinsip kelestarian lingkungan dan kepastian legalitas tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan hutan.

Reformasi Tata Kelola Minerba Dongkrak PNBP dan Stabilitas Harga Komoditas Indonesia



Sumber : Kementerian ESDM RI |

Penggetatan RKAB dan pengendalian pasokan batubara-nikel dorong penerimaan negara Rp108,13 triliun hingga Agustus 2026 meski volume produksi melambat.

Langkah Pemerintah Indonesia melakukan penataan ulang tata kelola sektor mineral dan batu bara (minerba) mulai membuahkan hasil nyata. Pengendalian pasokan (*supply and demand*) serta penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sukses menstabilkan harga pasar batubara dan nikel sekaligus mendingkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi PNBP subsektor minerba hingga Agustus 2026 telah menembus Rp 108,13 triliun, melanjutkan tren kuat 2025 yang mencatatkan realisasi Rp135,16 triliun dan investasi USD6,7 miliar, dengan total tenaga kerja subsektor minerba per semester I-2026 mencapai 685.724 orang.

Selanjutnya kebijakan pengetatan alokasi kuota produksi berhasil menaikkan royalti per ton, sehingga penerimaan fiskal negara tetap melejit walau volume produksi batubara lebih rendah dibanding tahun lalu.

Langkah disiplin kuota ini juga berhasil membendung manipulasi harga nikel domestik oleh spekulasi. Bahlil menegaskan prioritas utama kebijakan kini berpindah dari eksploitasi vo-

lume masif menuju optimalisasi nilai tambah fiskal yang selaras dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Produksi batu bara memang kita kurangi dibanding 2025, tetapi pendapatan negara justru lebih tinggi. Kita ingin pendapatan negara yang maksimal, bukan sekadar mengejar volume,” ujar Bahlil di Jakarta Senin (21/09).

Selain itu, arah kebijakan sektor minerba saat ini juga diarahkan menuju transformasi industri ekstraktif menjadi industri yang memiliki nilai tambah dan berbasis keberlanjutan.

Transformasi ekstraktif ini juga diimbangi penguatan Good Mining Practices dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang melibatkan 2.587 UMKM binaan dan programnya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat, pembentukan kelembagaan komunitas, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Sinergi ini memperkuat keseimbangan ekosistem pertambangan antara perlindungan pengusaha besar pembayar royalti dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Kinerja APBN Agustus 2026 Tetap Kredibel, Defisit Terkendali di Level 0,93% dari PDB



Sumber : Kementerian Keuangan RI |

Menteri Keuangan melaporkan penerimaan negara tumbuh 25,4%, ditopang keseimbangan primer positif dan belanja produktif, yang meningkatkan kepercayaan pasar.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencatatkan posisi kredibel dan terkendali. Dalam konferensi pers APBN KiTA, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa realisasi fiskal berada pada jalur yang tepat, ditopang keseimbangan primer positif serta defisit anggaran yang terjaga ketat pada level 0,93% terhadap PDB.

Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara terealisasi Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target tahunan, tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong penerimaan pajak yang melesat 24,1%, kepabeanan dan cukai senilai Rp210,2 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 41,7% mencapai Rp435,1 triliun.

Sisi pengeluaran mencatatkan belanja negara sebesar Rp2.295 triliun atau tumbuh 17,1%. Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak 33% menjadi Rp912,4 triliun diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, subsidi energi, dan penyerapan program produktif guna menopang daya beli masyarakat.

Sementara untuk realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp506 triliun. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah dibanding beberapa negara lainnya. spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin, yang berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.

“APBN hadir melindungi masyarakat. Pendapatan kita perkuat, belanja makin efektif dan efisien, serta defisit dikelola secara sehat guna menjaga kestabilan makro,” ujar Suahasil di Senayan Jumat (18/09).

Keberhasilan mempertahankan defisit pada level Rp240,1 triliun mempertegas komitmen pemerintah menjaga disiplin anggaran. Langkah ini menjadi bantalan penting bagi kepercayaan pasar, kepastian investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.

Atasi Krisis Demografi Jepang, Pemprov Jateng Siap Pasok Tenaga Pengemudi Terampil



Sumber : Pemprov Jawa Tengah |

Kerja sama Provinsi Jawa Tengah dan 3EEE Inc siapkan pekerja vokasi untukenuhi kelangkaan tenaga kerja transportasi di tengah penuaan populasi di Jepang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis asal Jepang, 3EEE Inc, yang berkantor pusat di kota Sapporo, Prefektur Hokkaido, guna menyiapkan tenaga pengemudi terampil. Langkah penyiapan tenaga kerja terlatih ini ditujukan untuk mengisi kelangkaan pengemudi di industri transportasi Jepang yang makin tertekan oleh krisis penuaan populasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengonfirmasi bahwa penyiapan calon pekerja dilakukan sejak pendidikan vokasi dan kejuruan, salah satunya melalui penguatan kemampuan bahasa Jepang, agar kemampuan calon tenaga kerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi Jepang. serta pelatihan teknis mengemudi, *eco-driving*, dan keselamatan transportasi. Penempatan pekerja migran asal Provinsi Jawa Tengah ke Jepang melesat 52%, dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025.

Sementara CEO 3EEE Inc. Norio Tanaka, menyoroti pergeseran demografi dramatis Jepang. Populasi yang saat ini sekitar 120 juta

jiwa diperkirakan menyusut di bawah 100 juta pasca-2040, dengan proporsi lansia mencapai 40%. Kondisi ini memicu defisit tenaga kerja akut di berbagai sektor pelayanan publik.

Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke Jepang, Head of the President's Office 3EEE Inc Hideo Mori mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar proses penyiapan dan penempatan tenaga kerja memiliki mekanisme yang jelas, serta memberikan kepastian bagi calon pekerja.

“Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat krusial terutama untuk berkoordinasi menjembatani informasi mengenai visa, dan ketentuan bekerja di Jepang, serta diharapkan pembahasan bisa segera ditindaklanjuti dan diputuskan secepat mungkin,” ungkap Hideo Mori Head of the President's Office 3EEE Inc. Senin (21/09).

Kemitraan ini menciptakan mobilitas tenaga kerja yang saling menguntungkan. Bagi Jepang, pasokan pekerja migran terampil menutup celah defisit demografi; sementara bagi Indonesia, program ini mendorong transfer pengetahuan dan teknologi maju untuk pembangunan nasional jangka panjang.

PGN Akselerasi Jaringan Gas Gresik-Sidoarjo Demi Swasembada Energi



Sumber : PGN |

Ekspansi jaringan gas rumah tangga ditargetkan capai 1 juta sambungan pada 2028 guna menekan beban subsidi APBN dan impor LPG nasional.

Pemerintah Indonesia mempercepat komitmen swasembada energi melalui perluasan program jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di Gresik dan Sidoarjo. Langkah strategis ini mengoptimalkan keterhubungan infrastruktur transmisi gas domestik, seperti pipa Cirebon-Semarang, guna memangkas ketergantungan impor LPG dan subsidi fiskal APBN.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bersama Kementerian ESDM mengawal peninjauan jargas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres 12/2025. Pemerintah tengah merampungkan 119.379 Sambungan Rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota untuk periode 2025-2026, termasuk 14.000 SR di Gresik dan Sidoarjo.

Akselerasi ini menjadi pembuka dari target masif 1 juta SR pada 2028. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai Subholding Gas Pertamina yang mengelola lebih dari 820 ribu pelanggan rumah tangga nasional, ditunjuk sebagai operator utama pengelola infrastruktur.

“Pengembangan jargas adalah bagian vital dari optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mereduksi beban subsidi

impor energi pada APBN,” ujar Direktur Infrastruktur Migas ESDM Agung Kuswardono Senin (21/09).

Pembangunan jaringan gas terus dilanjutkan seiring dengan semakin terkoneksinya infrastruktur gas bumi. Konektivitas jaringan transmisi, salah satunya Pipa Cirebon - Semarang, menjadi salah satu fondasi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga.

Untuk Provinsi Jawa Timur, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM telah membangun jaringan gas sebanyak 4.000 SR di Gresik sejak 2022 dan 29.961 SR di Sidoarjo sejak 2010 dengan memberi penugasan kepada PGN sebagai operator.

Direktur Infrastruktur PGN Hery Murahmanta menegaskan kesiapan PGN mendukung penugasan APBN ini, termasuk menyediakan solusi *beyond pipeline* seperti CNG guna meenjangkau wilayah yang belum dapat dilayani jaringan pipa. Sinergi ini memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus menjamin efisiensi pemanfaatan komoditas gas bumi secara nasional.

Ekspansi Energi Terbarukan Turki Pangkas Drastis Impor BBM



Sumber : Ministry of Energy and Natural Resources TR |

Produksi listrik tenaga angin dan surya selama satu dekade hemat biaya impor batubara USD21,5 miliar.

Investasi masif Turki pada sektor energi terbarukan berhasil menghasilkan 442,2 terawatt-jam (TWh) listrik dari tenaga surya dan angin sepanjang dekade 2015-2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam mengonfirmasi bahwa pencapaian ini berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil sebesar USD21,5 miliar untuk batubara atau senilai USD43,3 miliar untuk gas alam.

Akselerasi transisi ke sumber energi bersih ini menjadi pilar utama diversifikasi neraca perdagangan Ankara sekaligus mereduksi jejak karbon nasional. Penggantian penggunaan batubara impor melalui produksi energi terbarukan diperkirakan telah mencegah pelepasan sekitar 354 juta ton emisi karbondioksida ke atmosfer.

Pada tahun 2015, Turki menghasilkan total 11.847 gigawatt-jam listrik dari tenaga surya dan angin, menggantikan impor batu bara senilai USD300 juta dan mencegah emisi karbon dioksida sebesar 9,5 juta ton.

Menteri Energi Alparslan Bayraktar menegaskan Turki kini menempati peringkat ke-5 di Eropa dan ke-11 secara global dalam kapasitas terpasang energi terbarukan. Selama 10 tahun

terakhir, peningkatan produksi listrik dari tenaga surya dan angin telah menyebabkan penurunan bertahap emisi karbon yang dapat dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil.

“Kami memanfaatkan sumber daya terbarukan secara maksimal guna mengamankan kemandirian energi nasional dan menargetkan kapasitas 120.000 megawatt pada 2035,” ujar Alparslan Bayraktar Senin (21/09).

Sebelumnya Alparslan mengungkapkan tindakan untuk membatasi emisi dilakukan melalui elektrifikasi, dan Turki menargetkan Pada tahun 2035, setidaknya harus ada 7 hingga 10 juta kendaraan listrik di jalan-jalan Turki. Bus kota dan kendaraan pribadi harus beralih ke kendaraan listrik agar permintaan minyak Turki berkurang, dan menjadi negara yang mengurangi emisi dan mengakhiri ketergantungan pada sumber daya asing, yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai lebih dari USD 200 miliar.

Ankara optimistis ekspansi teknologi domestik secara konsisten akan memperkuat ketahanan pasokan energi dan menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Konsumsi Listrik Tiongkok Lampau 1 Triliun kWh, Didorong Lonjakan Sektor EV dan Pusat Data



Sumber : National Energy Administration PRC |

Beban daya di Tiongkok sentuh rekor 1,56 miliar kW pada bulan Agustus, mencerminkan pergeseran struktural ke arah manufaktur canggih dan infrastruktur digital.

Total konsumsi listrik Tiongkok kembali melampaui ambang batas satu triliun kilowatt-jam (kWh) pada bulan Agustus 2026, mencapai 1.033,2 miliar kWh atau tumbuh 1,7% secara tahunan. Menurut data Badan Energi Nasional Tiongkok yang dirilis Minggu (20/09) mencatatkan beban puncak listrik mencapai rekor tertinggi 1,56 miliar kilowatt, 49,69 juta kilowatt lebih tinggi dari beban puncak tahun sebelumnya.

Pertumbuhan energi ini merefleksikan transformasi ekonomi industri yang agresif. Industri primer mengonsumsi 16,9 miliar kWh, naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Industri sekunder mengonsumsi 612,4 miliar kWh, naik 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, konsumsi listrik industri mencapai 606,5 miliar kWh, naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara manufaktur teknologi tinggi dan peralatan mempertahankan pertumbuhan pesat, mencapai 122,2 miliar kWh, naik 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya; peralatan komputer dan komunikasi 7,5%, manufaktur otomotif 7,6%, kendaraan energi baru menyumbang

22,2%, manufaktur peralatan umum 7,6%, manufaktur peralatan khusus 8,2%, dan mesin listrik 12,3% semuanya mengalami pertumbuhan pesat dalam konsumsi listrik. Industri tersier mengonsumsi 215,5 miliar kWh, naik 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara Infrastruktur ekonomi baru mencatatkan ekspansi terkuat pada sektor jasa. Layanan pengisian daya kendaraan listrik (EV) melonjak 51,2% mencapai 17,2 miliar kWh, sementara konsumsi daya pusat data internet tumbuh 37,9% menjadi 10,2 miliar kWh.

“Pergeseran konsumsi ke arah EV dan pusat data membuktikan bahwa elektrifikasi Tiongkok kini digerakkan oleh sektor produktivitas masa depan,” ungkap analis di Dewan Kelistrikan Tiongkok (CEC).

Sebaliknya, konsumsi listrik rumah tangga terkoreksi 4,0% menjadi 188,3 miliar kWh akibat tingginya curah hujan dan badai topan yang mengurangi penggunaan pendingin udara. Secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2026, total konsumsi listrik Tiongkok mencapai 7.173 miliar kWh, mengonfirmasi ketahanan ekspansi industrinya.

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga ke 1,25%, Capai Rekor Tertinggi 31 Tahun



Sumber : Bank of Japan |

Gubernur BoJ tegaskan pergeseran kebijakan moneter guna stabilkan inflasi inti dan antisipasi lonjakan harga energi, booming teknologi AI dan pelemahan yen.

Bank Sentral Jepang (Nihon Ginkou/BOJ) menaikkan suku bunga acuan menjadi sekitar 1,25% dalam rapat kebijakan moneter pada Jumat (18/09). Langkah ini menandai kenaikan suku bunga pertama sejak Juni, membawa tingkat bunga acuan ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir sejak April 1995.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyatakan landscape kebijakan telah bergeser. Fokus utama kini berpindah dari memicu inflasi menuju upaya menstabilkan inflasi inti di kisaran target 2%, sekaligus meredam risiko kenaikan harga yang melonjak secara berlebihan.

Akselerasi ini terdorong membumbungnya permintaan terkait komputasi AI, potensi lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, serta pelemahan yen. Tekanan tersebut mempercepat transmisi kenaikan harga barang dan jasa ke level konsumen secara masif.

"Hingga saat ini, tujuan kebijakan jangka pendek adalah untuk menaikkan tingkat inflasi inti, tetapi risiko melebihi target stabilitas harga 2% telah terjadi, dan menjadi penting untuk menstabilkannya di sekitar 2% untuk mencegah dampak negatif pada perekonomian di masa

mendatang," ujar Ueda.

Lebih lanjut, Gubernur Ueda menyatakan kondisi moneter akan tetap akomodatif, dan menegaskan ia bermaksud terus menaikkan suku bunga di masa mendatang dengan meninjau prospek ekonomi dan harga serta mempertimbangkan berbagai risiko terkait.

Sebagai tanggapan atas kenaikan suku bunga acuan BoJ, bank swasta di Jepang mengumumkan kenaikan suku bunga rekening yen. Tiga bank besar —Mitsubishi UFJ Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan Mizuho Bank—mengumumkan kenaikan suku bunga deposito biasa yen menjadi 0,5% (dari suku bunga sebelumnya 0,4%) mulai 2 November (keduanya sebelum pajak). Sementara Japan Post Bank akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,5% mulai 9 November.

Meskipun kondisi keuangan dipastikan tetap akomodatif, BOJ memberi sinyal penyesuaian suku bunga secara berlanjut pada rapat mendatang. Keputusan independen Tokyo ini turut mendapat dukungan implisit dari otoritas keuangan global untuk memulihkan keseimbangan moneter jangka panjang.

Peluang Mancanegara

Selasa, 22 September 2026

Kemenkeu Pangkas Hambatan 'Returnable Package' Demi Efisiensi Bisnis



Sumber : Kementerian Keuangan RI |

Kementerian Keuangan berlakukan skema izin periodik dan hapus kewajiban jaminan kepabeanan.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2026 guna menyederhanakan regulasi impor dan ekspor sementara kemasan berulang (*returnable package*). Kebijakan yang berlaku efektif mulai 29 September 2026 ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi operasional bagi sektor industri kunci seperti otomotif, perikanan, dan manufaktur kimia.

Kasubdit Humas Bea Cukai Netty Hartawati menjelaskan PMK 52/2026 memisahkan ketentuan kemasan berulang dari konteks peti kemas (*container*), sejalan dengan norma *Customs Convention on Containers*. Reformasi ini mencakup skema *Returnable Package* Luar Negeri (RPLN) dan Dalam Negeri (RPDN).

Izin ekspor sementara RPDN berlaku maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang. Sementara, izin impor sementara RPLN berlaku hingga satu tahun dan dapat diperpanjang maksimal tiga tahun.

Returnable package merupakan alat kemas untuk melindungi, menyimpan, dan/atau mengelompokkan barang, baik yang menutupi maupun tidak menutupi barang, serta dapat di-

gunakan secara berulang. Di Indonesia, *returnable package* banyak digunakan dalam pengemasan produk impor dan ekspor seperti karet, ikan, bahan kimia atau gas, dan sparepart kendaraan bermotor.

Poin krusial dalam aturan ini adalah penggantian izin transaksional menjadi izin periodik hingga satu tahun yang dapat diperpanjang. Selain itu, pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban penyerahan jaminan finansial serta dikecualikan dari ketentuan pembatasan impor Kementerian Perdagangan.

“Penyederhanaan perizinan dan penghapusan jaminan finansial berulang bertujuan mengurangi beban biaya operasional pengusaha tanpa mengabaikan aspek pengawasan,” ujar Netty dalam siaran pers Senin (21/09).

Guna meminimalkan risiko kepabeanan, Bea Cukai mengintegrasikan tata kelola saldo kuota secara digital melalui Sistem Komputer Pelayanan. Pengawasan sewaktu-waktu dan sanksi denda administratif tetap diberlakukan bagi pelanggaran batas waktu re-ekspor, menciptakan keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan penegakan hukum.

Rekor Impor Beras Filipina Buka Peluang Bagi Eksportir Vietnam dan Indonesia



Sumber : Department of Agriculture PH |

Defisit produksi akibat El Niño paksa Manila amankan 5 juta ton beras, memicu persaingan ketat eksportir Asia Tenggara di tengah persaingan harga yang makin kompetitif.

Filipina diproyeksikan mencatatkan rekor volume impor beras lebih dari 5 juta ton pada 2026 guna menutup defisit produksi domestik 900.000 ton akibat iklim El Niño yang diperkirakan terjadi pada kuartal IV-2026. Menurut Departemen Pertanian Filipina peningkatan impor ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membangun cadangan penyangga.

Departemen Pertanian Filipina juga menyatakan peningkatan impor beras 2026 akan berfungsi sebagai bantalan pasokan untuk kuartal I-2027 guna mengantisipasi potensi musim panen yang tidak maksimal. Selanjutnya, volume impor tahun 2027 akan turun ke kisaran normal antara 3,8 juta MT sampai 4 juta MT.

Hingga pertengahan Agustus, Manila telah merealisasikan impor 3,46 juta ton, lebih tinggi dari angka 3,39 juta metrik ton yang tercatat tahun lalu, menurut Biro Industri Tanaman (BPI), dengan eksportir Vietnam menguasai 74% pangsa pasar, diikuti Kamboja, Pakistan dan Thailand. Keunggulan eksportir Vietnam ditopang strategi harga yang kompetitif; untuk jenis beras wangi 5% pecah asal Vietnam ditawarkan USD445–450 per ton, lebih murah

dibandingkan produk sejenis asal Thailand dengan kisaran harga USD478–482 per ton.

Dinamika tingginya permintaan Filipina turut dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi rencana ekspansi ekspor beras ke Filipina, Timor Leste, hingga Arab Saudi, memanfaatkan ketersediaan cadangan nasional yang mencapai rekor tertinggi 5,2 juta ton.

Sebelumnya, Indonesia telah merealisasikan ekspor beras ke Malaysia sebanyak 1.000 ton pada tahun ini dan volume ekspornya masih berpotensi meningkat karena tingginya kebutuhan Malaysia.

“Kapasitas cadangan beras berada pada level tertinggi dalam sejarah, membuka peluang akselerasi ekspor ke negara tetangga seperti Filipina,” ujar Amran akhir Agustus.

Meskipun nilai ekspor kumulatif Vietnam hingga Agustus terkoreksi 10,82% menjadi USD2,9 miliar, lonjakan permintaan dari Filipina diyakini menopang pendapatan regional akhir tahun. Kehadiran pasokan baru dari Indonesia semakin memperketat peta persaingan logistik pangan di Asia Tenggara.

India Incar Ekspor Gandum USD1,5 Miliar di Tengah Diversifikasi Pemasok Global



Sumber : Ministry of Agriculture and Farmer Welfare IN |

New Delhi melonggarkan kebijakan ekspor dan memanfaatkan surplus stok 51,3 juta ton serta harga jual kompetitif untuk isi celah ketatnya pasokan gandum dunia.

India berpeluang meraup pendapatan ekspor gandum hingga melebihi USD1,5 miliar seiring pelonggaran pembatasan perdagangan ekspor komoditas pertanian dan strategi pembeli global melonggarkan ketergantungan pada pemasok tradisional. Laporan The Associated Chambers of Commerce & Industry of India (Assocham) yang dirilis awal September mengonfirmasi bahwa setelah empat tahun melakukan pembatasan, New Delhi telah mengumumkan revisi kebijakan ekspor dari terbatas ke bebas untuk gandum tertentu dan produk turunannya seperti tepung gandum, tepung olahan, dan semolina.

Produsen gandum terbesar kedua di dunia ini mencatatkan rekor produksi 120,7 juta ton pada tahun fiskal 2025-2026. Dengan stok gandum pusat mencapai 51,3 juta ton—jauh melampaui ambang batas penyangga 27,58 juta ton—sehingga memberi keleluasaan bagi New Delhi untuk mengamankan kebutuhan domestik sekaligus mengekskspansi porsi pasar ekspor.

Daya saing India kian terdorong oleh keunggulan harga. Harga Dukungan Minimum (MSP) India sebesar USD268 per ton menawarkan selisih menarik dibanding rata-rata

harga internasional yang nilainya USD303 per ton. Kesenjangan harga yang mencapai USD 35 per ton ini menjadi salah satu pendorong yang menarik minat para negara importir utama seperti Bangladesh, Mesir, Indonesia, Filipina, Aljazair dan Maroko. Bangladesh mengimpor sekitar 6,7 juta ton gandum pada tahun fiskal 2024-2025, dan India sudah menjadi salah satu pemasok gandum utamanya.

“India memasuki fase paling menjanjikan dalam perdagangan gandum global, didukung surplus stok serta arbitrase harga yang kompetitif,” ungkap laporan Assocham.

Di tengah proyeksi penurunan produksi gandum dunia pada periode tahun 2026-2027 yang diperkirakan turun menjadi 819 juta ton akibat gangguan cuaca di sejumlah negara eksportir utama seperti Russia, Kanada dan Australia yang mendorong negara pengimpor gandum mencari sumber pasokan yang lebih beragam, dan India berpotensi memperkuat posisinya. Namun, kepastian kebijakan perdagangan, efisiensi logistik pelabuhan, dan konsistensi standar kualitas menjadi syarat mutlak keberlanjutan ekspansi pasar tersebut.